

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR
02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Dwita Ria Ayuning Putri

151010079

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR
02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Dwita Ria Ayuning Putri

151010079

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain. Dan skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan didalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang di peroleh, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

DWITA RIA AYUNING PUTRI
151010079

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR
02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

DWITA RIA AYUNING PUTRI

151010079

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Maret 2020

Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.

ABSTRAK

Batam adalah kota yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga banyak anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kota Batam. ditemukan kasus kekerasan pada anak di Kota Batam tahun 2014 sejumlah 56 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 72 kasus, tahun 2016 menjadi 24 kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 72 kasus, 2018 sejumlah 86 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 39 kasus. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dan Pemerintahan Kota Batam melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Aktor lain yang juga terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah kota Batam juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan mempertimbangkan bahwa masalah sering terjadi pada anak-anak baik di lingkungan sosial maupun di keluarga mereka sendiri. Undang-undang juga menjelaskan bahwa implementasi perlindungan anak adalah milik orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Kekerasan, Anak

ABSTRACT

Batam is a city that has a high level of violence against children. Cases of violence against children still occur in Indonesia, so that many children become victims of violence and exploitation in the family, according to data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning of the City Government of Batam. found cases of violence against children in Batam City in 2014 a number of 56 cases, in 2015 as many as 72 cases, in 2016 to 24 cases, in 2017 increased to 72 cases, 2018 a number of 86 cases, and in 2019 as many as 39 cases. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the role of the DPRD and Batam City Government carried out the formulation and produced a policy namely Regional Regulation No. 02 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection. Other actors who were also involved were the Office for Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning. In accordance with the mandate of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The Batam city government also issued Regional Regulation No. 02 of 2016 concerning the implementation of child protection, taking into account that problems often occur with children both in the social environment and in their own families. The law also explains that the implementation of child protection belongs to parents, families, the government and the state.

Keywords: *Formulation Policy, Violence, Children*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tak kan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia memberi arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Putera Batam.

6. Bapak / Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak / Ibu Dosen pengajar di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasinya.
8. Bapak Riky Indrakari selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam
9. Bapak Djoko Mulyono selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam
10. Ibu Dra. Diah Sri Purwanti selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di Kota Batam.
11. Bapak Iwan Kristanto selaku Kepala Bidang Kasih Perlindungan Anak yang bersedia memberikan data-data terkait penelitian tentang perlindungan anak.
12. Bapak Abdul Wahab selaku Tokoh Masyarakat yang ikut serta pada waktu pembentukan perda penyelenggaraan perlindungan telah bersedia memberikan informasi dalam melakukan penelitian.
13. Kedua orang tua saya ayahanda Iskandar Zainul Amin dan Ibunda Yayuk Wahyu Ningsih serta kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan , motivasi serta doa kepada penulis.

14. Suami saya Bhilal Widyatmoko dan anak saya Alula Muarabhita yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan saya Yessica Simanulang, Korne Anggarini, Elfira Agnes Pasaribu, dan Siti Hardiyanti yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis.
16. Rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Putera Batam program Studi Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis.
17. Seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Batam, 12 Maret 2020

Dwita Ria Ayuning Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	8
2.1.2 Formulasi Kebijakan.....	10
2.1.3 Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan.....	13
2.1.4 Komponen Proses Formulasi Kebijakan.....	15
2.1.5 Implementasi Kebijakan.....	17
2.1.6 Evaluasi Kebijakan	19
2.1.7 Analisis Kebijakan	21
2.1.8 Peraturan Daerah	22
2.1.9 Perlindungan Anak.....	26
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5	Metode Analisis Data	39
3.6	Keabsahan Data.....	40
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Sekertariat DPRD Kota Batam.....	42
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam.....	49
4.2	Pembentukan Peraturan Daerah	53
4.3	Hasil Penelitian	54
4.3.1	Formulasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Batam	54
4.4	Pembahasan	66
4.3.1	Formulasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Batam	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	SIMPULAN.....	74
5.2	SARAN	76
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian		
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah korban kekerasan pada anak 2014-2016 di Kota Batam	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batam.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas P3APKB	51
Gambar 4.3 Kebijakan Perumusan Masalah di kantor DPRD Batam.....	57
Gambar 4.4 Pemilihan Alternatif Kebijakan di Kantor DPRD Batam	63
Gambar 4.5 Pengesahan Kebijakan di kantor DPRD Kota Batam	69